



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023



KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANYUASIN, KEDONDONG RAYE
KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
WWW.PN-PANGKALANBALAI.GO.ID

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kedondong Raye,
Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
www.pn-pangkalanbalai.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada berbagai pihak, *stakeholder* dan masyarakat yang berkepentingan terhadap Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Pangkalan Balai Tahun 2023 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Pangkalan Balai Tahun 2023 ini diharapkan dapat sebagai masukan baik itu kepada Pimpinan atau lainnya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Pangkalan Balai kedepannya sehingga juga kedepannya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terus melanjutkan cita-cita Mahkamah Agung RI menuju

peradilan yang agung.

Pangkalan Balai, 02 Januari 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BALAI**


NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4285/KPT.W6-U/OT1.6/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKJIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKJIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggung jawabkan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Dengan berakhirnya Periode 2023, maka LKjIP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

**TABEL CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI TAHUN 2023**

Tabel 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	93,75	98,68
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	102,86	108,27
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100

Tabel 2 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023
(Lanjutan)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85	88,35	104
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	92,92	109
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	97,74	108,6
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5	5	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

Tabel 3 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023
(Lanjutan)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN				102,38	

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisa capaian data di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam laporan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi	5
1.2.1. Tugas	5
1.2.2. Fungsi	6
1.3. Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	22
2.1.1. Visi Dan Misi	22
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	23
2.1.3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	25
2.1.4. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	32
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023	33
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	40
3.1.1. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	71
3.1.2. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	73
3.1.3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 74	

3.1.4.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	77
3.1.5.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	81
3.1.6.	Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	82
3.1.7.	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
3.1.8.	Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	86
3.2.	Realisasi Anggaran	87
BAB IV PENUTUP		91
4.1.	Kesimpulan	91
4.2.	Rekomendasi	92
LAMPIRAN		95

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023	vi
Tabel 2	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 (Lanjutan)	vii
Tabel 3	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 (Lanjutan)	viii
Tabel 2. 1.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	25
Tabel 2. 2.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)	26
Tabel 2. 3.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)	27
Tabel 2. 4.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)	28
Tabel 2. 5.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)	29
Tabel 2. 6.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)	30
Tabel 2. 7.	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)	31
Tabel 2. 8.	Anggaran Tahun 2023	33
Tabel 2. 9.	Tabel Awal Rencana Kinerja Tahun 2023	34
Tabel 2. 10.	Tabel Awal Rencana Kinerja Tahun 2023	35
Tabel 2. 11.	Reviu Rencana Kinerja	36
Tabel 2. 12.	Reviu Rencana Kinerja (Lanjutan)	37
Tabel 2. 13.	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
Tabel 2. 14.	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Lanjutan)	39
Tabel 3. 1.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	41
Tabel 3. 2.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 (Lanjutan)	42
Tabel 3. 3.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 3. 4.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 (Lanjutan)	44
Tabel 3. 5.	Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2023	45
Tabel 3. 6.	Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2022	45
Tabel 3. 7.	Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2022 (Lanjutan) ..	46
Tabel 3. 8.	Keadaan Perkara Tahun 2023	47

Tabel 3. 9. Keadaan Perkara Tahun 2022	47
Tabel 3. 10. Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	49
Tabel 3. 11. Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	49
Tabel 3. 12. Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata 2023 yang Diselesaikan Tepat Waktu	50
Tabel 3. 13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata 2022 yang Diselesaikan Tepat Waktu	50
Tabel 3. 14. Capaian Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	52
Tabel 3. 15. Capaian Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	52
Tabel 3. 16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	54
Tabel 3. 17. Perkara Pidana Berhasil Restoratif Tahun 2023	55
Tabel 3. 18. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Restoratif Tahun 2023	56
Tabel 3. 19. Perkara Pidana Berhasil Restoratif Tahun 2022	56
Tabel 3. 20. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Restoratif Tahun 2022	56
Tabel 3. 21. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	57
Tabel 3. 22. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022	58
Tabel 3. 23. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	59
Tabel 3. 24. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022	61
Tabel 3. 25. Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2023	64
Tabel 3. 26. Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2022	65
Tabel 3. 27. Capaian Kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan tahun 2023	65
Tabel 3. 28. Nilai Interval Konversi	66
Tabel 3. 29. Indeks Kepuasan Masyarakat	67
Tabel 3. 30. Capaian Kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan ..	68
Tabel 3. 31. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022	69
Tabel 3. 32. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2023	70
Tabel 3. 33. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2022	71
Tabel 3. 34. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi tahun 2023 ..	74
Tabel 3. 35. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	

tahun 2023	74
Tabel 3. 36. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi tahun 2022	75
Tabel 3. 37. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2022	75
Tabel 3. 38. Capaian Sasaran Strategis III tahun 2023	76
Tabel 3. 39. Capain Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2023	78
Tabel 3. 40. Capain Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2022	78
Tabel 3. 41. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2023	80
Tabel 3. 42. Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	81
Tabel 3. 43. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2022	81
Tabel 3. 44. Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) tahun 2022	82
Tabel 3. 45. Tingkat Efektifitas	85
Tabel 3. 46. Sumber Daya Manusia Teknis	85
Tabel 3. 47. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial	86
Tabel 3. 48. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	88
Tabel 3. 49. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 03	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	51
Grafik 3. 2. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	51
Grafik 3. 3. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	54
Grafik 3. 4. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	54
Grafik 3. 5. Capain Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	57
Grafik 3. 6. Capain Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022	59
Grafik 3. 7. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	60
Grafik 3. 8. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administrasi Banyuasin	3
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama periode 2023 juga tidak lepas menghadapi beberapa kendala baik teknis maupun non-teknis antara lain:

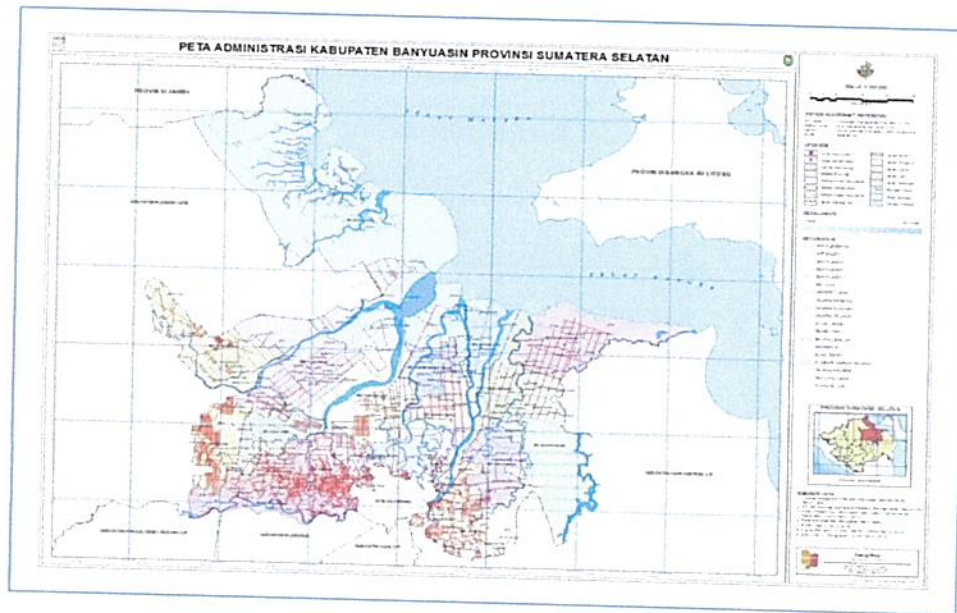
1. Masih kurangnya jumlah hakim dan panitera pengganti, sehingga jadwal persidangan menumpuk yang otomatis menghambat dalam waktu penyelesaian persidangan atau perkara.
2. Kurangnya ASN golongan II terutama untuk ditempatkan sebagai operator dan petugas register.
3. Kurangnya anggaran baik dipa dari Badan urusan Administrasi (dipa 01) maupun dari Badan Peradilan Umum (dipa 03) guna menunjang operasional. Hal tersebut seringkali mengharuskan satuan kerja untuk merevisi anggaran baik itu

antar komponen maupun antar satker dan juga mengajukan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

4. Masih minimnya pelatihan baik untuk struktural maupun fungsional bagi aparaturnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna meningkatkan kemampuan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah hukum Kabupaten Banyuasin secara *Organisatoris, Administratif Dan Financial*.

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan Banyuasin Diarsipkan 2020-07-20 di *Wayback Machine*. Banyuasin sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa *banyu* (air) dan *asin*, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang masin rasanya, terutama ke arah pantai.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administrasi Banyuasin

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km² di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Melayu Banyuasin (Melayu Pesisir). Batas Wilayah banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota Palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin memiliki 21 kecamatan, 16 kelurahan dan 288 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2022, jumlah penduduknya sebesar 878.154 jiwa dengan luas wilayahnya 11.832,99 km² dan sebaran penduduk 68 jiwa/km².

Dengan wilayah hukum yang cukup besar, sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentulah memiliki tanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa

dan negara. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas- asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk

menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

1.2.1. Tugas

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

1.2.2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain:

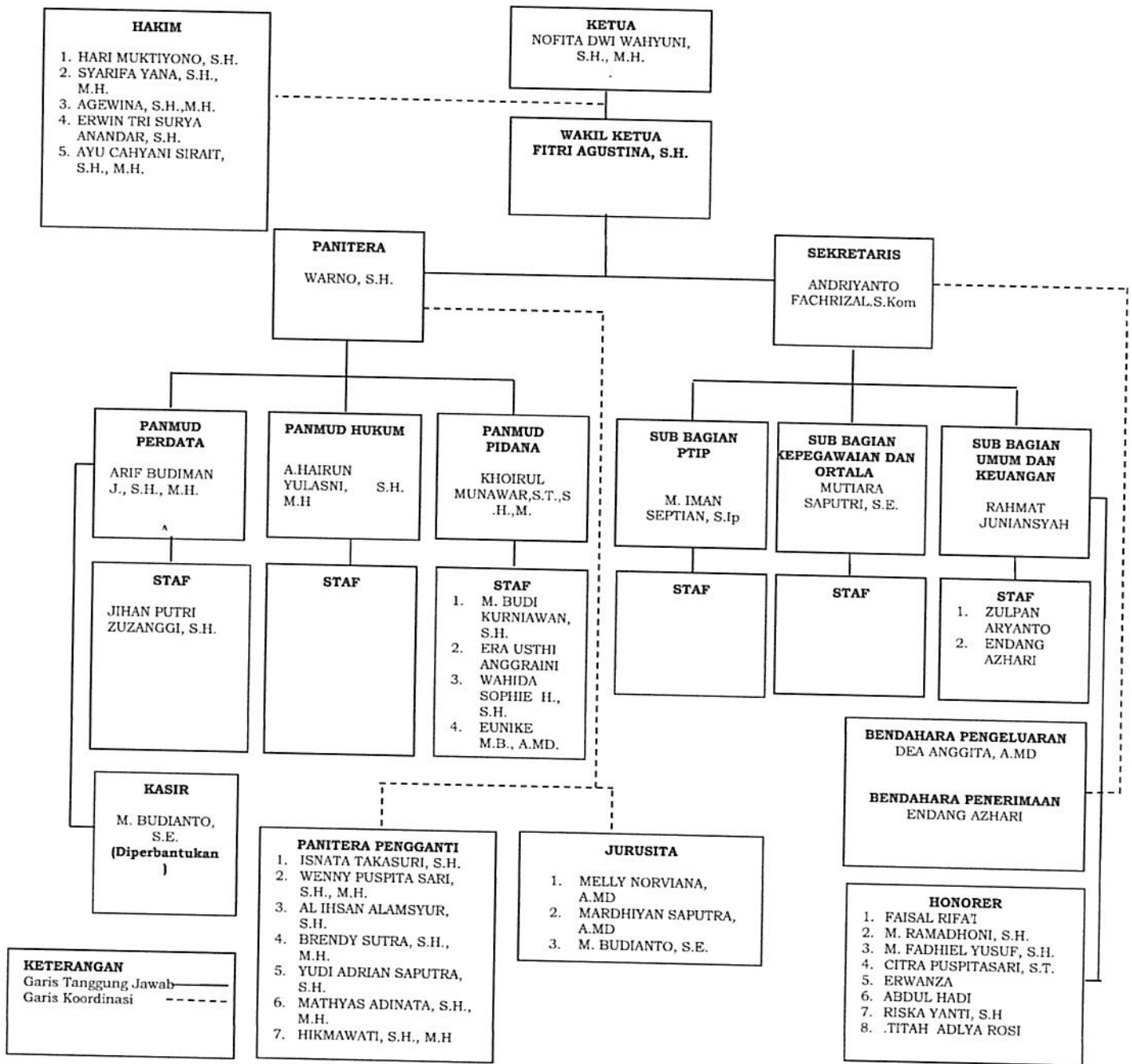
- a. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan, maupun Administrasi Umum/ Perlengkapan, Keuangan, dan Kepegawaian.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya**: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur organisasi Pengadilan Negeri. Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN NEGERI

- a. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.
- b. Membuat:
 1. Perencanaan (*planning, programming*) dan perorganisasian (*organizing*).
 2. Pelaksanaan (*implementation dan executing*)
 3. Pengawas (*evaluation dan controlling*) yang baik, serasi dan selaras.
- c. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
- d. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat / petugas yang bersangkutan.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin / pembangunan.
- f. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- g. Membuat/ menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- h. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.

- j. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- k. Melakukan pengawasan intern.
 - Intern : Pejabat peradilan, keuangan dan material.
- l. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.
- m.
 1. Melakukan Evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
 2. Melaporkan evaluasi atas hasil Pengawasan dan penilaiannya Mahkamah Agung.
 3. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
 4. Mempersiapkan Kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
- n. Melakukan pembinaan terhadap Dharmayukti Karini, IKAHI, Koperasi dan PTWP.
- o. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- p. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

2. WAKIL KETUA

- a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian.
- b. Mewakili ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerjadan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. HAKIM

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- c. Pengadilan Negeri melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Permasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

KEPANITERAAN

1. PANITERA

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,

- pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
 - c. Membantu pimpinan pengadilan dalam pembinaan pegawai.
 - d. Membantu hakim dalam persidangan perkara pidana dan perdata.
 - e. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda menyelenggarakan administrasi mengenai jalannya perkara pidana dan perkara perdata dan situasi keuangan perkara perdata.
 - f. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 - g. Membuat akta dan salinan putusan.
 - h. Menerima dan mengirim berkas perkara.
 - i. Melaksanakan Eksekusi putusan perkara perdata.
 - j. Menyelenggarakan pendaftaran Badan Hukum Perseroan terbatas, Perseroan Commanditer dan Yayasan.
 - k. Menerima dan mendatangi pendaftaran surat kuasa, melegalisasi surat-surat bukti perkara yang diajukan kepersidangan.
 - l. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.
 - m. Membuat dan Menandatangani Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

2. PANITERA MUDA PIDANA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggaraan administrasi perkara dan pengolahan penyusunan laporan perkara perdata.
- c. Mengkoordinir / membagi tugas urusan perdata untuk diberikan kepada bawahan.
- d. Melaksanakan tugas administrasi perkara perdata, menerima dan memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima serta mencatatnya dalam register perdata.
- e. Menyiapkan berkas perkara banding/ kasasi untuk dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
- f. Menyerahkan Arsip berkas perkara ke Panitera Muda Hukum.
- g. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.
- h. Meneliti mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

3. STAF PANITERA MUDA PIDANA

- a. pemegang buku register perkara singkat.
- b. pemegang buku register perkara lalu lintas dan perkara cepat.
- c. pemegang buku register penyitaan.

- d. pemegang buku register pengeledahan.
- e. pemegang buku register praperadilan.
- f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
 - 1.Laporan Keadaan perkara pidana.
 - 2.Laporan Jenis perkara pidana.
- g. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
 - 1.Laporan perkara banding.
 - 2.Laporan perkara kasasi.
 - 3.Laporan perkara PK.
 - 4.Laporan perkara yang terdakwanya mengajukan Grasi/Remisi.
- h. Menyiapkan dan membuat laporan Semester.
 - 1. Laporan kegiatan hakim.
 - 2. Laporan pelaksanaan tugas Hakim.
- i. Kearsipan
 - 1.Berkas perkara yang masih aktif dan yang telah diminutasi.
 - 2.Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana.

4. PANITERA MUDA PERDATA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan pengelolaan penyusunan laporan perkara pidana.
- c. Menyerahkan arsip berkas perkara ke Panitera Muda

Hukum.

- d. Membantu Hakim dalam persidangan Perkara Pidana dan perkara perdata.
- e. Mengelola keuangan Perkara Pidana, Uang bantuan Hukum dan uang jaminan penangguhan penahanan.
- f. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

5. PANITERA MUDA HUKUM

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengelolaan penyusunan laporan perkara.
- c. Menerima dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah non aktif.
- d. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.
- e. Melakukan pendaftaran Badan Hukum berupa PT, CV, Firma dan Yayasan serta badan hukum lainnya.
- f. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

6. STAF PANITERA MUDA HUKUM

- a. Menyelenggarakan pendaftaran badan-badan hukum PT, CV, Firma, dan Yayasan.
- b. Mendata dan menyusun arsip berkas perkara pidana dan perdata.
- c. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

- d. Mengelola dan menyajikan data/dokumentasi Pengadilan.

7. PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

8. JURUSITA

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua pengadilan, Ketua Sidang Dan Panitera dalam hal perkara perdata.
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah.
- d. Membuat berita Acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang berkenaan dengan kejurusitaan.

KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIS

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- b. Mengatur pembagian tugas pejabat Kesekretariatan.
- c. Membantu pimpinan pengadilan dalam pembinaan pegawai.
- d. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Mengkoordinir para Kepala Sub. Bagian serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.
- e. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung Jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran.
- f. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
- g. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.
- h. Membuat dan Menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

2. KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

- a. Membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang.pelaksanaannya serta pengorganisasian.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Keuangan.
- c. Membagi tugas urusan keuangan untuk diberikan kepada para staf.
- d. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan peralatan kantor/langganan daya dan jasa untuk mendapatkan penyelesaian.
- e. Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dalam rangka meminta data

- keuangan.
- f. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP.
 - g. Menelitian kelengkapan dan kebenaran register penutupan KAS.
 - h. Meneliti SPJ penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti pengeluaran.
 - i. Menyelesaikan surat-surat yang berkenaan dengan pinjaman untuk ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri.
 - j. Menyelesaikan administrasi Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu.
 - k. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Umum.
 - l. Membagi tugas urusan Umum untuk diberikan kepada para staf.
 - m. Mengkoordinir surat masuk dan surat keluar.
 - n. Membuat daftar Inventaris Ruangan.
 - o. Menyelenggarakan kearsipan surat.
 - p. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.
 - q. Menyelenggarakan pemeliharaan alat, perlengkapan kantor, gedung dan rumah dinas.
 - r. Membuat dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

3. STAF KASUB KEUANGAN (BENDAHARA)

- a. Melaksanakan tugas perbedaharaan bersumber dari pelaksanaan APBN.
- b. Mengajukan SPP Pembayaran langsung, SPP Penyediaan Dana UYHD (SPP-DU), SPP Penggantian

Dana UYHD (SPP-DU) dan SPP Tambahan UYHD (SPP-TU).

- c. Mengadakan pembukuan atas pengeluaran dana UYHD kedalam buku kas umum Tabelaris dan Pembantu setiap MAK.
- d. Mencairkan uang sesuai SP2D yang diterima.
- e. Laporan untuk pertanggung jawaban setiap pengeluaran dana UYHD.
- f. Menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas.
- g. Melakukan pemotongan PPH atas Pengeluaran dana UYHD.

4. STAF KASUB UMUM

- a. Menerima dan membukukan surat masuk dan keluar
- b. Mengirim surat-surat dinas
- c. Menyampaikan surat masuk kebagian masing-masing.
- d. Membantu membuat daftar inventaris ruangan.
- e. Membantu membuat kartu inventaris barang.
- f. dan tugas yang diberikan kepadanya.

5. KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Kepegawaian.
- c. Membagi tugas urusan Kepegawaian untuk diberikan kepada para staf.
- d. Menyusun data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas dan diklat.
- e. Mengusulkan pemberian penghargaan tanda

kehormatan.

- f. Menyusun Bezetting dan DUK.
- g. Melakukan permintaan KARPEG, KARSIS, KARSU DAN TASPEN.
- h. Menyelenggarakan sumpah PNS, pelantikan dan sumpah Jabatan.
- i. Mengusulkan Kenaikan pangkat pegawai/jabatan struktur dan fungsional.
- j. Mengusulkan dan menyelenggarakan administrasi mutasi pegawai.
- k. Mengusulkan pemberhentian dan pensiun pegawai.
- l. Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian .
- m. Meneliti dan mengkoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.
- n. Membuat dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

6. STAF KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- a. Mengerjakan *Bezetting*, DUK, Surat Pernyataan menduduki jabatan.
- b. Membuat usul kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala.
- c. Mengerjakan usul permintaan Karis dan Karsu.
- d. Mengerjakan usul mutasi, Menyiapkan Penyempahan PNS, Jabatan.
- e. Mengerjakan daftar Hadir Pegawai.
- f. Mengerjakan Surat Izin cuti Pegawai.
- g. Mengerjakan Permintaan Askes, Karpeg , Taspen.
- h. Mengerjakan usul pemberhentian Pegawai dan pensiun.
- i. Mengerjakan surat permintaan Pengujian kesehatan

bagi para CPNS dan tugas lain yang diberikan kepadanya.

7. KASUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran.
- d. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
- e. *Mengupload* segala bentuk laporan dan berita ke dalam *website*.
- f. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware*, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
- g. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer.
- h. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan teknologi informasi
- j. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker baru yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran yang telah di tetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi:

2.1.1. Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan–tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundan–undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang di sesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPNJP) 2005- 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2020–2024. Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Agung Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat bangsa dan negara.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai

kepastian dan berkeadilan.

2. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel.
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah di reviu untuk mempertajam sasaran strategis.

2.1.1.3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> / <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u> = 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif <u>100%</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan <u>100%</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

Tabel 2. 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

Tabel 2. 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim Tepat Waktu <hr/> Jumlah putusan 100% Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. 5. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi berhasil _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. 6. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan <u>100%</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum <u>100%</u></p> <p>Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

Tabel 2. 7. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p><u>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</u> / <u>Jumlah permohonan eksekusi</u> = 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.1.4. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang sesuai tercantum di dalam DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan Program tersebut adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan Program tersebut adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel 2. 8. Anggaran Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.143.558.000,-	Rp. 5.113.318.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 5.788.614.000,-	Rp. 6.639.096.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 187.800.000,-	Rp. 167.800.000,-

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memuat angka target kinerja Tahun 2023 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan

Kinerja. Dengan adanya reviu Indikator Kinerja Utama maka Rencana Kinerja Tahun 2023 juga mengalami perubahan. Adapun awal Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

● TABEL AWAL RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Tabel 2. 9. Tabel Awal Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	95
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	95
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	85
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90

Tabel 2. 10. Tabel Awal Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.	10
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).	10

● TABEL REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Tabel 2. 11. Reviu Rencana Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	95
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	95
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	85
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.	5

Tabel 2. 12. Reviu Rencana Kinerja (Lanjutan)

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).	100

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Untuk perjanjian kinerja tahun 2023 juga mengalami perubahan menyesuaikan yang telah ditetapkan. Adapun hasil reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 13. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5

Tabel 2. 14. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Lanjutan)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan kerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang di dapat dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rata-rata tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut jabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	93,75	98,68
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	102,86	108,27
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85	88,35	104
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	92,92	109
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100	100	100
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	97,74	108,6
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100

Tabel 3. 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 (Lanjutan)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5	5	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN				102,38	

Hasil capaian di dapat dari perhitungan dengan formula di bawah ini :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan rata-rata mencapai 102,38 %. atau 102 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil sudah sangat baik. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

Berikut Capaian Kinerja beserta table tahun 2022:

Tabel 3. 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	h. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	98,11	122,63
		i. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11
		j. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100
		k. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95	91,36	96,17
		l. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95,55	100,58
		m. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100	0	0
		n. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	99,59	110,65
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
e. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	100			100	100

Tabel 3. 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 (Lanjutan)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		tepat waktu			
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100	0	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0
RATA-RATA CAPAIAN				86,76	

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel

Besar target yang ditetapkan pada sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Berikut tabel dan grafik capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2023:

Tabel 3. 5. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2023

Sasaran Strategis I	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel	
Indikator Kinerja	Capaian %
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,68
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	108,30
c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	104
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	109
f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100
g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	108,6
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I	104

Tabel 3. 6. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2022

Sasaran Strategis I	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	122,63
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	111,11
c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	96,17
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100,58
f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0

Tabel 3. 7. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2022 (Lanjutan)

Sasaran Strategis I	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel	
Indikator Kinerja	Capaian
g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	110,65
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I	91,59

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan mengukur sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan index responden pencari keadilan. Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2023 mendapat capaian rata-rata sebesar **104%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada kategori sangat baik.

Untuk Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel periode 2022, capaian rata-rata adalah 91,59%

Terjadi penurunan dikarenakan adanya perubahan target pada beberapa komponen yang berpengaruh pada unsur penilaian.

Sebelum menganalisis kinerja utama terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, berikut tampilkan tabel keadaan perkara tahun 2023 dan 2022 pada

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai :

Tabel 3. 8. Keadaan Perkara Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa Perkara (2022)	Perkara Masuk (2023)	Perkara Putus (2023)	Sisa Perkara (2023)
Perdata Permohonan	0	25	25	0
Perdata Gugatan	12	37	33	16
Perdata Gugatan Sederhana	0	22	22	0
Pidana Biasa	81	383	405	59
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	17	17	0
Pidana Anak	2	19	20	1
Praperadilan	0	2	1	0
Jumlah	95	505	523	76

Tabel 3. 9. Keadaan Perkara Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Perkara (2021)	Perkara Masuk (2022)	Perkara Putus (2022)	Sisa Perkara (2022)
Perdata Permohonan	1	19	20	-
Perdata Gugatan	14	45	46	12
Perdata Gugatan Sederhana	2	2	4	-
Pidana Biasa	96	441	456	81
Pidana Singkat	-	5	5	-
Pidana Cepat	-	14	14	-
Pidana Anak	-	15	13	2
Praperadilan	-	9	8	0
Jumlah	113	550	566	95

Untuk perkara Praperadilan tahun 2023 dari 2 (dua) perkara,

satu diantaranya cabut dan satu nya lagi putus.

Selanjutnya pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar perkara masuk pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 dan 2022 di dominasi oleh jenis perkara pidana biasa yaitu sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) perkara di tahun 2023 dan 441 perkara pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 total perkara masuk sebanyak 505 (lima ratus lima) perkara terdiri dari perkara Perdata permohonan sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara, Perdata Gugatan 37 (tiga puluh tujuh) perkara, Perdata Gugatan Sederhana 22 (dua puluh dua) perkara, Pidana Biasa 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) perkara, Pidana Singkat 0 (nol), Pidana Cepat 17 (tujuh belas), Pidana Anak 19 (sembilan belas), dan Praperadilan sebanyak 2 (dua) perkara.

Di bawah ini akan dijelaskan analisis indikator kinerja pada sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan & akuntabel, yaitu:

a. Analisis Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi.

4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk penyelesaian perkara gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, hari yang dimaksud adalah hari kerja. Berikut ini tabel persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3. 10. Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Perkara	Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Perdata yang Diselesaikan
Perdata Gugatan	28	33
Perdata Gugatan Sederhana	22	22
Perdata Permohonan	25	25
Jumlah	75	80

Tabel 3. 11. Capaian Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

Perkara	Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Perdata yang Diselesaikan
Perdata Gugatan	31	32
Perdata Gugatan Sederhana	2	2
Perdata Permohonan	19	19
Jumlah	52	53

Tahun 2023

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{75}{80} \times 100\% = \mathbf{93,75\%}$$

Tahun 2022

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{52}{53} \times 100\% = \mathbf{98,11\%}$$

Pada tahun 2023 di dapat nilai realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **93,75%**. Nilai tersebut di dapat dari perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan dikali seratus. Untuk nilai capaian indikator kinerja ini sebesar **98,68%**. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 93,75% berbanding target yang telah ditetapkan sebesar 95% lalu dikali 100%.

Tabel 3. 12. Capain Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata 2023 yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	93,75	98,68

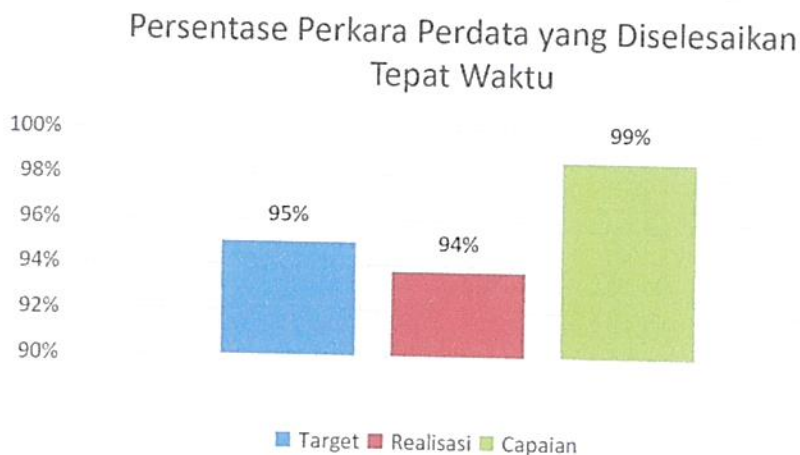
Tabel 3. 13. Capain Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata 2022 yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	98,11%	122,63%

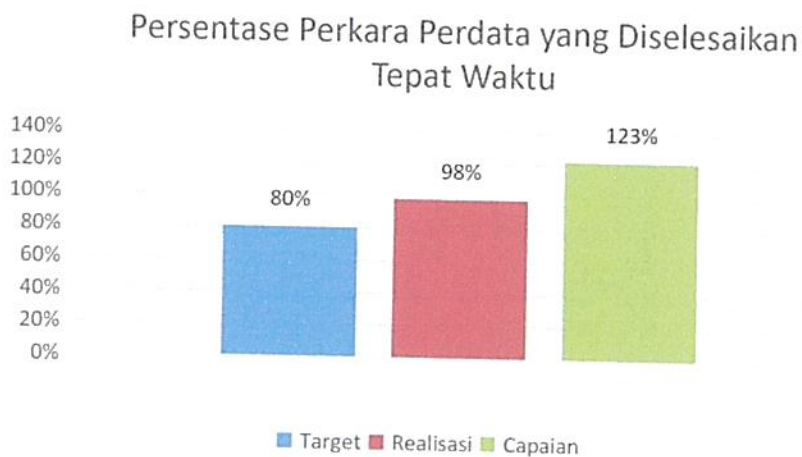
Dari sini dapat dianalisa bahwasanya tahun 2023 terjadi

penurunan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata 2022 yang Diselesaikan Tepat Waktu dikarenakan adanya perubahan kenaikan Target dari 80% (2022) menjadi 95% (2023).

Berikut ini grafik dari indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu:



Grafik 3. 1. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023



Grafik 3. 2. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

b. Analisis Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat

Waktu

Sama seperti perkara perdata, tenggat waktu lamanya penyelesaian perkara pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Berikut ini tabel persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu .

Tabel 3. 14. Capain Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Perkara	Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Pidana yang Diselesaikan
Pidana Biasa	405	299
Pidana Anak	20	14
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	17	18
Praperadilan	2	3
Lalulintas	3505	3505
Jumlah	3949	3839

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3949}{3839} \times 100\% = \mathbf{102,86\%}$$

Tabel 3. 15. Capain Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

Perkara	Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Pidana yang Diselesaikan
Pidana Biasa	345	345
Pidana Anak	13	13
Pidana Singkat	5	5
Pidana Cepat	14	14
Praperadilan	8	8
Lalulintas	2922	2922
Jumlah	3307	3307

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{3307}{3307} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2022 di dapat nilai realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar **100%**. Nilai tersebut di dapat dari perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perkara pidana yang diselesaikan. Dengan nilai realisasi sebesar 100% maka nilai capaian untuk indikator kinerja ini sebesar **111,11%**. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 100% berbanding target yang telah ditetapkan sebesar 90% lalu dikali 100%.

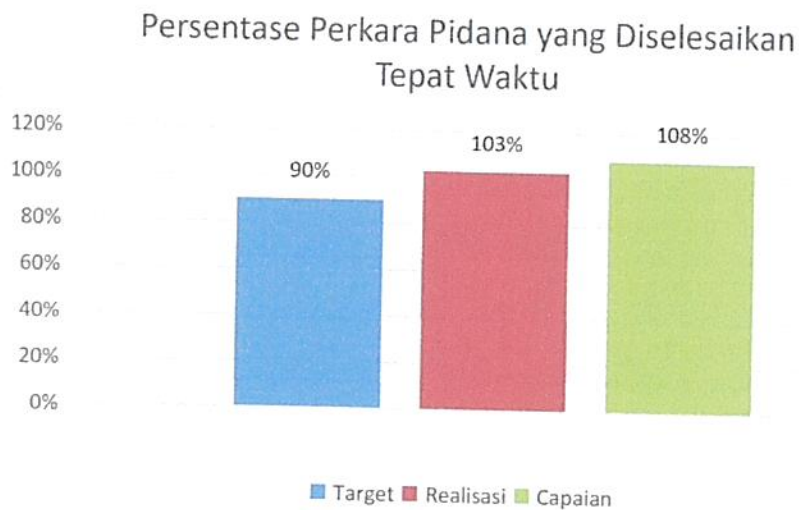
Pada tahun 2023 di dapat nilai realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar **102,86%**. Nilai tersebut di dapat dari perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perkara pidana yang diselesaikan dikali 100%. Dengan nilai realisasi sebesar **102,86%**. maka nilai capaian untuk indikator kinerja ini sebesar **108,27%**. Nilai tersebut didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 100% berbanding target

yang telah ditetapkan sebesar 95% lalu dikali 100%.

Tabel 3. 16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

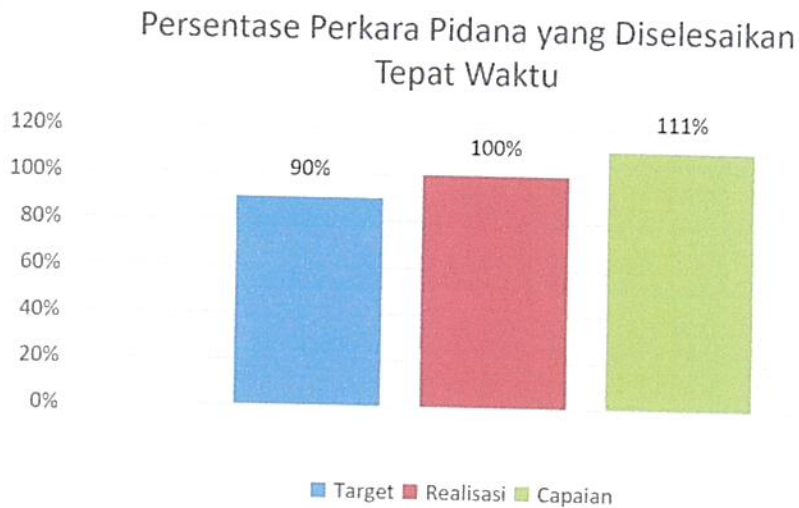
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	102,86%	108,27%

Berikut ini grafik dari indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023:



Grafik 3. 3. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Grafik 3. 4. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022



c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat 1 perkara pidana yang diajukan untuk diselesaikan dengan restoratif dan terdapat 1 perkara yang dinyatakan berhasil:

Tabel 3. 17. Perkara Pidana Berhasil Restoratif Tahun 2023

Jumlah Perkara Pidana yang diajukan dengan restoratif	Berhasil Restoratif	Tidak Berhasil Restoratif	Proses
1	1	0	0

Tabel 3. 18. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Restoratif Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	100%	100%	100%

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3. 19. Perkara Pidana Berhasil Restoratif Tahun 2022

Jumlah Perkara Pidana yang diajukan dengan restoratif	Berhasil Restoratif	Tidak Berhasil Restoratif	Proses
1	1	0	0

Tabel 3. 20. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Restoratif Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	100%	100%	100%

Jumlah perkara pidana yang diajukan menggunakan pendekatan restoratif pada tahun 2023 dan 2022 sebanyak 1 perkara. Dari 1 perkara tersebut berhasil untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dengan begitu nilai realisasi dan capaian indikator ini masing-masing sebesar 100% dan 100% dalam

arti dari perkara yg diajukan ditahun tersebut berhasil diselesaikan

d. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 3. 21. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

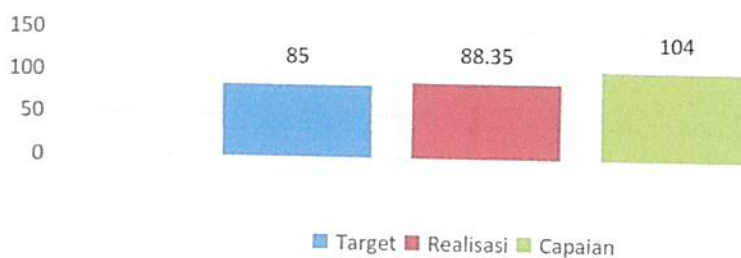
Perkara	Perkara yang Diputus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang tidak Mengajukan Banding	Target %	Realisasi %	Capaian %
Perdata	33	14	20	85	88,35	104
Pidana	405	38	367			
Jumlah	438	52	387			

Untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dimana untuk total perkara yang tidak mengajukan banding sebesar 387 perkara, dan untuk perkara yang diputus total perkara pidana dan perdata sebesar 438 perkara. Untuk rumus yang dipakai dalam mencari nilai persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{387}{438} \times 100\% = 88,35\%$$

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Grafik 3. 5. Capain Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

Tabel 3. 22. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

Perkara	Perkara yang Diputus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	32	10	22	95%	91,36%	96,17%
Pidana	373	25	348			
Jumlah	405	35	370			

Total perkara banding tahun 2022 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebanyak 35 perkara terdiri dari 10 perkara perdata dan 25 perkara pidana.

Untuk perkara perdata dari 32 perkara perdata gugatan yang diputus pada tahun 2022 terdapat 22 yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Di lihat dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bisa diterima oleh para pihak sedangkan untuk perkara perdata permohonan upaya hukumnya langsung ke tingkat kasasi. Untuk perkara pidana terdapat sebanyak 348 perkara pidana yang tidak diajukan upaya hukum banding dari 373 perkara pidana yang diputus pada tahun 2022.

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini, diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 370 perkara dan jumlah perkara yang diputus sebanyak 405 perkara.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{370}{405} \times 100\% = \mathbf{91,36\%}$$

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 91,36% dengan target sebesar 95% lalu dikali

100% yaitu **96,17%**. Berikut Grafik untuk indikator ini.



Grafik 3. 6. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

Untuk nilai capaian tahun 2023 didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 88,35% dengan target sebesar 85% lalu dikali 100% yaitu **104%**.

Terdapat kenaikan nilai capaian ditahun 2023 dan 2022 dimana tahun 2022 capaiannya sebesar 96,17%, dan ditahun 2023 sebesar 104%. hal ini dikarenakan adanya reuiu atas target dari Capain Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dimana semula dari tahun 2022 sebesar 95 diturunkan (d disesuaikan) menjadi 85 ditahun 2023.

e. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 3. 23. Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Perkara yang Diputus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	33	12	21	85	92,92	109
Pidana	404	19	386			
Jumlah	438	31	407			

Total perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 sebanyak 31 perkara terdiri dari 12 perkara perdata dan 19 perkara pidana. Untuk perkara perdata dari 33 perkara perdata yang diputus pada tahun 2023 terdapat 21 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Untuk perkara pidana dari 404 perkara pidana yang diputus terdapat 19 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan sisa 386 perkara lainnya tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara kasasi yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{407}{438} \times 100\% = \mathbf{92,92\%}$$

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini, diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 407 perkara dan jumlah perkara yang diputus sebanyak 438 perkara.

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 92,92% dengan target sebesar 85% lalu dikali 100% yaitu **109%**. Berikut Grafik untuk indikator ini.



Grafik 3. 7. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Untuk perbandingan ditahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 24. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Perkara	Perkara yang Diputus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	32	7	25	95%	95,55%	100,58%
Pidana	373	11	362			
Jumlah	405	18	387			

Total perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 sebanyak 18 perkara terdiri dari 7 perkara perdata dan 11 perkara pidana. Untuk perkara perdata dari 32 perkara perdata yang diputus pada tahun 2022 terdapat 25 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Untuk perkara pidana dari 373 perkara pidana yang diputus terdapat 11 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan sisa 362 perkara lainnya tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

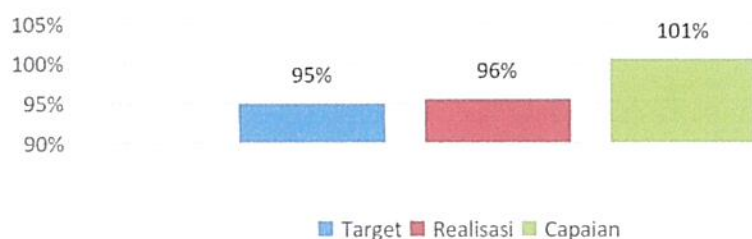
$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{387}{405} \times 100\% = \mathbf{95,55\%}$$

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini, diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 387 perkara dan jumlah perkara yang diputus sebanyak 405 perkara.

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi sebesar 95,55% dengan target sebesar 95% lalu dikali 100% yaitu **100,58%**.

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Grafik 3. 8. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Pada tahun 2023 dan 2022 untuk Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi terdapat kenaikan capaian dari 100,58% (tahun 2022) menjadi 109% (tahun 2023). hal ini dikarenakan adanya revisi target Indikator Kinerja Utama dari 95% (tahun 2022) menjadi 85% (tahun 2023).

f. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat

lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak dijelaskan tahapan musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi (hakim) dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.
3. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja social professional memberikan informasi tentang keadaan social anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan

pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.

8. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi.
9. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

Pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terdapat 3 (tiga) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.

Tabel 3. 25. Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi Tahun 2023

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversifikasi	Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversifikasi	Target	Realisasi	Capaian
19	3	3	100	100	100

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Diversifikasi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversifikasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Dengan nilai realisasi 100% dan target sebesar 100% maka capaian di dapat sebesar **100%**. Capaian yang didapat pada indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi tahun 2023 mengalami kenaikan yang mana tahun 2022 realisasinya 0 % yang mana artinya tidak ada perkara yang diselesaikan secara diversifikasi ditahun 2022, kini ditahun 2023 sebesar 100% atau dari 3 (tiga) perkara diversifikasi seluruhnya berhasil.

Berikut tabel perkara diversi tahu 2022:

Tabel 3. 26. Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2022

Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
15	-	100%	0%	0%

g. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 90%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Index Kepuasan Pencari Keadilan” ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 27. Capaian Kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	97,74	108,6

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan survey kepuasan masyarakat setiap triwulan yang mana setiap tahun nya berakhir pada periode IV (September sd

November). Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti: masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan memberikan kuesioner atau angket. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain: Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3. 28. Nilai Interval Konversi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Internal Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja dan Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29. Indeks Kepuasan Masyarakat

Periode	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Mutu Pelayanan
Januari - Maret 2022		98,43	
Apri - Juni 2022		99,40	
Juli - September 2022		94,19	
Oktober - Desember 2022		98,95	
Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023		390,97	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2023 (semester I sd IV) memiliki nilai sebesar **97,74** yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **SANGAT BAIK**. Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90% dan realisasi yang di dapat 97,74 maka capaian dari indikator ini sebesar **108,6%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{97,74}{90} \times 100\% = \mathbf{108,6\%}$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 90%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Index Kepuasan

Pencari Keadilan” ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 30. Capaian Kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	99,59%	110,65%

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan survey kepuasan masyarakat setiap triwulan. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti: masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan memberikan kuesioner atau angket. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain: Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Untuk hasil survei tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3. 31. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022

Periode	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Mutu Pelayanan
Januari - Maret 2022	116	99,14	Sangat Baik
Apri - Juni 2022	134	99,54	Sangat Baik
Juli - September 2022	85	99,84	Sangat Baik
Oktober - Desember 2022	41	99,86	Sangat Baik
Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022		99,59	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar **99,59** yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **SANGAT BAIK**. Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90 dan realisasi yang di dapat 99,59 maka capaian dari indikator ini sebesar **110,65%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{99,59}{90} \times 100\% = \mathbf{110,65\%}$$

Pada tahun 2022 dan tahun 2023 untuk indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dari capaian tahun 2022 sebesar 110,65% menjadi 108,6 % pada tahun 2023. hal ini dikarenakan adanya jumlah responden yang berkurang pada tahun 2023 sehingga mempengaruhi komponen perhitungan penilaian.

Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari 3 (tiga) indikator antara lain: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu, Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu, Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi. Berikut tabel sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Tabel 3. 32. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2023

Sasaran Strategis II	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II	68,33

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar **68,33%**. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara telah berjalan dengan **baik**. Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Direktori Putusan dan implementasi *e-court* semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk tahun 2022 capaian peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3. 33. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2022

Sasaran Strategis II	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II	66,66

3.1.1. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan pada angka 1 disebutkan bahwa pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan pada perkara perdata dikenakan biaya PNBPN, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus lalu dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 terdapat 75 perkara perdata yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada para pihak. Dari 75 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar 100%. Dengan target dan realisasi 100% maka capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi teknis perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah berjalan sesuai dengan Standar Prosedure Operational yang ditetapkan.

Pada tahun 2022 terdapat 52 perkara perdata yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada para pihak. Dari 52 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar 100%. Dengan target dan realisasi 100% maka capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi teknis perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah berjalan sesuai dengan Standar Prosedure Operational yang ditetapkan.

3.1.2. Analisis Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan pada angka 2 disebutkan bahwa untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus lalu dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 terdapat 3949 perkara pidana yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita kepada para pihak. Dari 3949 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar 100%. Dengan target 100% maka capaian indikator persentase

salinan putusan perkara pidana yang dikirim para pihak tepat waktu sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi teknis perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah berjalan sesuai dengan Standar Prosedure Operational yang ditetapkan.

Untuk perkara pidana tahun 2022 sebanyak 3307 dengan target yang sama yaitu 100%

Walaupun capaian masing-masing 100 persen tetapi terjadi kenaikan penyelesaian perkara tahun 2022-2023 dari 3307 menjadi 3949 perkara.

3.1.3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian perkara dengan dibantu pihak ketiga (mediator) yang netral atau tidak memihak baik itu dari hakim maupun non-hakim yang mana untuk menjadi seorang mediator harus memiliki sertifikat terlebih dahulu sebagai seorang mediator. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang memberikan bantuan berupa alternative penyelesaian perkara. Pada tahun 2023, terdapat 20 perkara perdata yang mediasi. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 34. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi tahun 2023

Jumlah Perkara Perdata yang Mediasi	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Proses
20	1	19	0

Tabel 3. 35. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2023

Indikator Kinerja	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perkara yang dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	20 perkara	5 %	5%	100%

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{20} \times 100\% = 5\%$$

Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara dari 20 perkara perdata yang dilakukan secara mediasi. Dengan begitu nilai realisasi dan capaian indikator sebesar 5% dan 100% dengan target yang telah ditetapkan kedalam reviu IKU sebesar 5%. Kemudian penyebab perkara gugatan tidak dapat diselesaikan seluruhnya melalui mediasi biasanya dikarenakan adanya rasa ketidakadilan masing-masing pihak atas hasil mediasi yang ingin mereka sepakati atau jauh dari harapannya pembicaraan selama proses mediasi berlangsung.

Mediasi adalah penyelesaian perkara dengan dibantu pihak ketiga (mediator) yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang memberikan bantuan berupa alternative penyelesaian perkara. Pada tahun 2022, terdapat 32 perkara perdata yang dimediasi dan terdapat 0 perkara yang dinyatakan mediasi berhasil:

Tabel 3. 36. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi tahun 2022

Jumlah Perkara Perdata yang Mediasi	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Proses
32	0	32	0

Tabel 3. 37. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2022

Indikator Kinerja	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perkara yang dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	-	32 perkara	100%	0%	0%

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{0}{32} \times 100\% = 0\%$$

Hal ini ini dikarenakan tahun 2022 dari 32 perkara mediasi tidak satupun yang berhasil kesepakatan.

Sasaran III : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum). Berikut tabel capaiannya:

Tabel 3. 38. Capaian Sasaran Strategis III tahun 2023

Sasaran Strategis III	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
Indikator Kinerja	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III	100%

3.1.4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a / b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.

c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum “Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai untuk pemberi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Adapun anggaran yang dialokasikan dan realisasinya tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 39. Capain Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2023

Output	Volume / Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
(1049. QBA.032) Pos Bantuan Hukum	240 jam	24.000.000	24.000.000	100%	0

Tabel 3. 40. Capain Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2022

Output	Volume / Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
(1050. QBA.032) Pos Bantuan Hukum	240 jam	24.000.000	24.000.000	100%	0

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan dikalikan seratus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencara Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{32}{32} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Diketahui pada tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan jumlah pemohon layanan hukum sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka capaian indikator kinerja ini sebesar **100%**.

Diketahui pada tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan jumlah pemohon layanan hukum sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka capaian indikator kinerja ini sebesar **100%**.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencara Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

Walau menempati capaian yang sama tetapi pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah pencari keadilan dari 32 (tiga puluh dua orang) tahun 2023 dan untuk 2022 sebesar 24 (dua puluh empat) orang. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dan informasi yang terbuka baik itu melalui website, browsur maupun spanduk yang mana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki layanan posbakum.

Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Berikut tabel capaian sasaran ini :

Tabel 3. 41. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2023

Sasaran Strategis IV	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV	100%

3.1.5. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Tabel 3. 42. Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Tahun	Jumlah Putusan BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
2023	1	1	100	100	100

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan/menindak lanjuti 1 (satu) eksekusi dari 1 (satu) eksekusi yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak ada melaksanakan eksekusi dikarenakan selama tahun 2022 belum adanya perkara yang mengajukan sampai ke tingkat eksekusi, akan tetapi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tetap melaksanakan delegasi eksekusi dari Pengadilan Negeri lainnya.

Tabel 3. 43. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2022

Sasaran Strategis IV	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	0
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV	0%

Tabel 3. 44. Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) tahun 2022

Tahun	Jumlah Putusan BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
2022	1	Nihil	100	0	0

3.1.6. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2023 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2023 pada beberapa target di karenakan:

- a. Adanya komitmen yang besar dari pimpinan sampai kepada pelaksana untuk tetap berkomitmen dalam melaksanakan Setandar Operasional (SOP) dan *desk job* pada setiap bagian;
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan administrasi perkara secara lebih tertib;
- c. Adanya aplikasi Monitoring SIPP (MIS) yang dapat memonitoring kinerja penyelesaian perkara yang bisa dipantau oleh tiap pengguna SIPP dan juga pimpinan satker;
- d. Dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di internal ruangan kepaniteraan / subbagian masing-masing dan rapat bulanan keseluruhan.
- e. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di

tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara masuk hingga perkaraminutasi.

- f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu:

Pada indikator kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu belum dapat mencapai target baik target ditahun 2023. yang mana untuk target tahun 2023 sebesar 95% sampai akhir 2023 mencapai 93,75% atau capaian ouput sebesar 98,68%. Hal ini dikarenakan para pihak ada yang tidak hadir/berhalangan hadir, kemudian dilakukan pemanggilan lagi ditambah dengan banyaknya saksi yang diajukan para pihak secara bertahap dan tidak sekaligus. Selain itu terkait kondisi geografis wilayah hukum Pangkalan Balai yg meliputi perairan dan perkebunan yang mana baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi para pihak untuk hadir pada persidangan.

Untuk indikator kinerja yang telah tercapai targetnya, Pengadilan Pangkalan Balai akan berusaha untuk mempertahankan. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dan realisasinya sesuai dengan target yang diinginkan.

3.1.7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber Daya Anggaran maupun Sumber Daya Manusia.

a. Analisis efisiensi Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 5,123,189,000,- (Lima Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp 331,200,000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Implementasi pengukuran efektifitas anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja dengan pagu anggaran belanja keseluruhan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan:

- a. Tingkat pencapaian diatas 100%: Sangat Efektif
- b. Tingkat pencapaian 90% - 100%: Efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90%: Cukup Efektif
- d. Tingkat pencapaian 60% - 80%: Kurang Efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60%: Tidak Efektif

Tabel 3. 45. Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2023

NO	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat efektifitas	KET
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.113.318.000	4.761.325.870	93,12	Efektif
2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	6.639.096.000	6.532.014.325	98,39	Efektif
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	167.800.000	167.276.905	99,69	Efektif

b. Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) Orang Hakim, 8 (Delapan) Orang Pejabat Struktural, 10 (sepuluh) Orang Pejabat Fungsional, 6 (enam) Orang Pelaksana, 1 (satu) orang PPPK dan 8 (delapan) Orang PPNPN.

Tabel 3. 46. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Hakim (Ketua / Wakil)	2	5	7
2	Panitera	1	-	1
3	Panitera Muda Hukum	1	-	1
4	Panitera Muda Perdata	1	-	1
5	Panitera Muda Pidana	1	-	1
6	Panitera Pengganti	4	3	7
7	Jurusita	2	1	3
Jumlah		12	9	21

Tabel 3. 47. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kasubag Umum dan Keuangan	1	-	1
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1
4	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	1
5	Pelaksana	2	4	6
6	PPPK	-	1	1
7	Tenaga Honorer (PPNPN)	5	3	8
Jumlah		10	9	19

Untuk jumlah hakim, ASN, P3K dan PPNPM yang ada masih sangat kurang untuk menangani beban pekerjaan yang ada yang mana juga ada beberapa pelaksana dan juga PPNPM masih merangkap dalam beberapa pekerjaan seperti operator keuangan maupun petugas PTSP.

3.1.8. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2023 telah disusun dengan mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima.

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2023 ini diperoleh dengan

kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, laporan tersebut dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 untuk DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan total alokasi anggaran sebelum revisi sebesar **Rp10.932.172.000,-** (*sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) kemudian setelah dilakukan revisi sebesar **Rp11.752.414.000,-** (*sebelas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA 03 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan total alokasi anggaran sebelum revisi sebesar **Rp187.800.000,-** (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) kemudian setelah dilakukan revisi sebesar **Rp167.800.000,-** (*Seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*). Adapun rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

❖ **DIPA (005.01) Badan Urusan Administrasi**

Di bawah ini tabel pagu dan Realisasi Belanja Dipa 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (401909) tahun 2023:

Tabel 3. 48. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	4.446.000	4.446.000	4.440.000	99,87	6.000
Gaji & Tunjangan	3.699.983.000	3.699.983.000	3.352.438.647	90,61	347.544.353
Operasional & Pemeliharaan Kantor	1.439.129.000	1.408.889.000	1.404.447.223	99,68	4.441.777
Layanan Prasarana Internal	5.788.614.000	5.788.614.000	5.685.014.325	98,21	103.599.675
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		850.482.000	847.000.000	99,59	3,482.000
Total	10.932.172.000	11.752.414.000	11.293.340.195	96,09	459.073.805

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa susunan RKA K/L anggaran dipa 01 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk periode 2023 terdiri dari 5 (lima) komponen. Antara lain; Dukungan manajemen Non Operasional satker Daerah, Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, sarana dan Prasarana Internal, Pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran. Untuk Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.446.000 (*empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*) terserap 99,87% atau Rp. 4.440.000 (*empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

Gaji dan tunjangan dari total anggaran sebesar Rp.3.699.983.000,- (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) terserap 90,61% atau sebesar Rp.3.352.438.647,- (*tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Operasional & Pemeliharaan kantor dengan total anggaran Rp.1.408.889.000,- (*satu milyar empat ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu*) terserap 99,68% atau Rp 1,404.447.223,- (*satu milyar empat ratus empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)

Layanan Prasarana Internal dengan total anggaran Rp.5.788.614.00,- (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah*) terserap 98,21% atau sebesar Rp.5.685.014.325,- (*lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).

Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.850.482.000,- (*delapan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) terserap 99,59% atau sebesar Rp.847.000.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah*).

❖ **DIPA (005.03) Ditjen Badan Peradilan Umum**

Di bawah ini tabel pagu dan Realisasi Belanja Dipa 03 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (402017) tahun 2023:

Tabel 3. 49. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 03

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
Perkara Hukum Perseorangan	163.800.000	143.800.000	143.276.905	99,64	523.095
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100	0
Total	187.800.000	167.800.000	167.276.905	99,69	523.095

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (402017) terdiri dari dua jenis belanja yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Layanan Bantuan Hukum Perseorangan. Dari total pagu untuk Perkara Hukum Perseorangan setelah revisi sebesar Rp143.800.000,-(*seratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan total realisasi sebesar Rp.143.276.905,-(*seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah*) atau 99,64%

Layanan Bantuan Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000,-(*dua puluh empat juta rupiah*) terserap Rp. 24.000.000,-(*dua puluh empat juta rupiah*) atau 100 %.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi (LKjIP).

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Untuk nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2023 sebesar 102,38% yang mana terjadi peningkatan dari tahun 2022 dengan nilai capaian kinerja 95,10%.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai khususnya sampai dengan periode 2023 antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah hakim dan panitera pengganti, sehingga jadwal persidangan menumpuk yang otomatis menghambat dalam waktu penyelesaian persidangan atau perkara.
2. Kurangnya ASN golongan II terutama untuk ditempatkan

sebagai operator dan petugas register.

3. Kurangnya anggaran baik dipa dari Badan urusan Administrasi (dipa 01) maupun dari Badan Peradilan Umum (dipa 03) guna menunjang operasional. Hal tersebut seringkali mengharuskan satuan kerja untuk merevisi anggaran baik itu antar komponen maupun antar satker dan juga mengajukan Anggaran Tambahan Belanja (ABT).
4. Masih minimnya pelatihan baik untuk strukturan maupun fungsional bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna meningkatkan kemampuan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

4.2. Rekomendasi

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan

kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu lebih ditingkatkannya pelatihan baik bagi Hakim, Pejabat dan Staf Fungsional maupun Struktural terkait peningkatan mutu kerja dan juga keterampilan guna menghadapi tuntutan dan perkembangan di dunia kerja.
2. Perlu adanya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
4. Dibutuhkannya pemantauan secara berkala dan berjenjang pada setiap bidang dari pimpinan guna menjaga akuntabel (monev berkala).
5. Keterbukaan, kerjasama dan perhitungan yang profesional di tiap bagian guna memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.
6. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerjasama yang baik dan kedisiplinan

tinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

v

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Jakarta, 19 Desember 2023
Sifat : Terbatas
Hal : Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding
dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Tahun 2023.

Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan **paling lambat tanggal 28 Februari 2024** melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>
2. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada link <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>
3. Website masing-masing Satuan Kerja.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (<https://bsre.bssn.go.id/repository>).

Apabila masih memerlukan penjelasan ataupun asistensi dalam penyusunan Dokumen SAKIP, dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melalui aplikasi BcSign atau Panter (<https://bsre.bssn.go.id/repository>).



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning
Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos 30151 www.pt-palembang.go.id, info@pt-palembang.go.id

Nomor : 4285 /KPT.W6-U/OT1.6/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023

27 Desember 2023

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
di -
Tempat

Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta kepada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 & 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj|P) Tahun 2023.

Dokumen SAKIP sebagaimana tersebut di atas disampaikan paling lambat tanggal **28 Februari 2024** melalui:

1. Pos/jasa pengiriman ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding (dalam bentuk *hard copy*);
2. *Email* ditujukan ke renprog_ang.ptplg@gmail.com;
3. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tautan <https://esr.menpan.go.id/>;
4. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada tautan <https://komdanas.mahkamahagung.go.id/>;
5. Website masing-masing Satuan Kerja.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA
MOH. EKA KARTIKA E.M.

Tembusan:
Pit. Sekretaris Mahkamah Agung RI



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 1C/KPN.W6-U10/SK.RA.1.1/1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
 Pada tanggal : 2 Januari 2024
 KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BALAI
Nomor : 1C/KPN.W6-U10/SK.RA1.1/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Jabatan	Nama
1.	Penganggung Jawab	Nofita Dwi Wahyuni, S.H, M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Fitri Agustina, S.H.
3.	Ketua	Warno, S.H.
4.	Sekretariat	Andrianto Fachrizal, S.Kom.
5.	Anggota	1. A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. 2. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. 3. Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H. 4. Rahmat Juniansyah 5. Mutiara Saputri
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. M. Iman Septian, S.IP. 2. M. Nouval Dwi Aditya, A.Md.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BALAI,



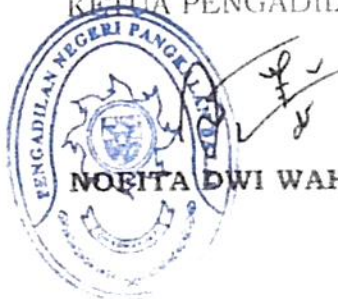
NOFITA DWI WAHYUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BALAI
Nomor : 1C/KPN.W6-U10/SK.RA1.1/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Penganggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada aparatur pengawasan intern pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisa indikator kinerja pada masing masing unit Eselon I
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



NOBITA DWI WAHYUNI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Jalan Jenderal Sudirman, KM.3,5, Pahlawan, Kecamatan Kemuning
Kota Palembang, Sumatera Selatan (30126), www.pt-palembang.go.id., info@pt-palembang.go.id.

Palembang, 16 Januari 2024

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
di –

Pangkalan Balai

SURAT PENGANTAR
Nomor : 355/KPT.W6-U/KP3.4.3/1/2024

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Perjanjian KInerja atas nama NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H NIP.197811252002122002, Pembina Tingkat I (IV/B), Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.	1 eksemplar	-
2.	Pakta Integritas atas nama NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H NIP.197811252002122002, Pembina Tingkat I (IV/B), Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.	1 eksemplar	-

Yang telah di tanda tangani oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang.

Diterima tanggal

Penerima

.....

Pengirim
An. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang,
Kabag Perencanaan dan Kepegawaian



ISHAK RIZAL, ST

NIP.

Nomor Telepon :

Pos-el :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Nomor : 39/W6-U10/RA1.10/I/2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2024

Pihak Pertama


Ketua

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

Pihak Kedua

Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang,


MOH EKA KARTIKA EM
NIP. 195811101984031005

NOFITA DWI WAHYUNI
NIP. 197811252002122002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 39/W6-U10/RA1.10/I/2024

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
2.		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
10.		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5

11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 3.095.749.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 0
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 171.800.000,-

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang,



MOH EKA KARTIKA EM
NIP. 195811101984031005

Palembang, Januari 2024
Pihak Pertama
Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,



NOFITA DWI WAHYUNI
NIP. 197811252002122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta Pusat, 25 November 1978
NIP : 197811252002122002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Palembang, 9 Januari 2024

Mengetahui :
Atasan Langsung



Dr. MOH. EKA KARTIKA, E.M., S.H., M.Hum.
NIP. 195811101984031005

Pembuat Pernyataan,



NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.
NIP. 197811252002122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Palembang, 9 Januari 2024

Mengetahui :
Atasan Langsung



Dr. MOH. EKA KARTIKA, E.M., S.H., M.Hum.
NIP. 195811101984031005

Pembuat Pernyataan,



3042BAKX768947066
METERAI
TEMPER

NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.
NIP. 197811252002122002

DATA JUMLAH PERKARA
 DALAM TAHUN 2023
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No.	PERKARA PIDANA BIASA / ANAK	JUMLAH		KET
		BIASA	ANAK	
1	2	3	4	5
1	Sisa Tahun 2022	81	2	
2	Masuk tahun 2023	383	19	
3	Putus Tahun 2023	405	20	
4	Sisa Tahun 2023	59	1	
5	Banding Tahun 2023	34	4	
6	Kasasi Tahun 2023	14	1	
7	Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2023	1	1	
8	Grasi Tahun 2023	-	-	

No.	PERKARA PIDANA CEPAT / SINGKAT / LALU LINTAS/PRAPERADILAN	JUMLAH				KET
		CEPAT	SINGKAT	LL	PRAPID	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Tahun 2022	-	-	-	2	
2	Masuk tahun 2023	17	-	3505	2	
3	Putus Tahun 2023	17	-	3505	2	
4	Sisa Tahun 2023	-	-	-	-	

No.	PERKARA PERDATA GUGATAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2022	12	
2	Masuk tahun 2023	37	
3	Putus Tahun 2023	33	
4	Sisa Tahun 2023	15	
5	Banding Tahun 2023	14	
6	Kasasi Tahun 2023	14	
7	Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2023	1	
8	Eksekusi Tahun 2023 (Masuk)	-	

No.	PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2022	-	
2	Masuk tahun 2023	22	
3	Putus Tahun 2023	19	
4	Sisa Tahun 2023	3	

No.	PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2022	-	
2	Masuk tahun 2023	25	
3	Putus Tahun 2023	22	
4	Sisa Tahun 2023	3	



Mengetahui,
 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

NOFITA DWI WAHYUNI, SH, MH
 NIP. 197811252002122002

Pangkalan Balai, 29 Desember 2023

Pih Panitera,

A. HAIRUN YULASNI, SH, MH
 NIP. 19700725 199003 1 001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 10,932,172,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			10,932,172,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5,143,558,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,143,558,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1066.EBA.962	Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 Laporan		4,446,000	
051	Layanan Umum			4,446,000	
C	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			4,446,000	
521252	Inventaris Perkantoran CPNS			4,446,000	RM
	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu)			4,446,000	
	- Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) [2 ORG x 1 THN]	2.0 OT	2,223,000	4,446,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,139,112,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,454,678,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			38,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	34,341	34,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			100,174,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			28,683,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 10,932,172,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			28,944,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,259,218,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,439,129,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>464,252,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			436,922,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
	- KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	1.0 THN	75,665,804	75,665,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu)			27,330,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	911,000	27,330,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 10,932,172,000

Halaman: 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			222,630,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			189,000,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG]	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu)			12,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu)			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu)			4,000,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			457,135,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu)			272,064,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	109,000	272,064,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu)			185,071,000	RM
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	25,000,000	75,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			100,132,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			28,216,000	RM
	- Seragam Dinas CPNS [2 CPNS x 2 STEL]	4.0 STEL	804,000	3,216,000	
	- Pakaian Dinas Honorerer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 10,932,172,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu)			71,916,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,547,000	18,564,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBPN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	880,000	10,560,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,596,000	19,152,000	
E	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc			136,080,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu)			136,080,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [9 ORG x 12 BLN]	108.0 OB	1,260,000	136,080,000	
H	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding			45,900,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			45,900,000	RM
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	200,000	5,600,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,000	24,000,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	200,000	8,000,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
I	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL			8,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			8,000,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	
J	Penanganan Pandemi COVID-19			5,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			5,788,614,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1.0 Unit, m2, Paket		5,788,614,000	
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 m2		5,788,614,000	
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			5,788,614,000	
A	Lanjutan Sarling Kantor			5,788,614,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 10,932,172,000

Halaman: 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			5,788,614,000	RM
	- Fisik	1.0 Keg	5,010,614,000	5,010,614,000	
	- Perencana	1.0 Keg	101,000,000	101,000,000	
	- Pengawas	1.0 Keg	510,000,000	510,000,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 Keg	167,000,000	167,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 19 Februari 2024

Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
 NIP.197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 11,752,414,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			11,752,414,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5,113,318,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,113,318,000	

1066.EBA.962	Lokasi : KAB. BANYUASIN	1.0 Laporan		4,446,000	
051	Layanan Umum			4,446,000	
C	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			4,446,000	
521252	Inventaris Perkantoran CPNS			4,446,000	RM
	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel				
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) [2 ORG x 1 THN]	2.0 OT	2,223,000	4,446,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,108,872,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,545,686,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	113,178,160	113,178,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	113,004,700	113,004,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,319,504,820	1,319,504,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			47,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	38,341	38,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			110,939,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	95,425,530	95,425,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,680,360	7,680,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,834,850	7,834,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			31,531,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	27,063,000	27,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,198,930	2,198,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,270,438	2,270,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 11,752,414,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			28,020,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,000,000	24,000,000	
				1,176,090,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,009,350,000	1,009,350,000	
				156,114,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	124,638,000	124,638,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	15,751,286	15,751,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	15,725,030	15,725,000	
				93,812,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
				421,977,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
				120,395,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,005,000	2,005,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,825,000	1,825,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
				10,589,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Gaji Pokok PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	2,647,290	10,589,000	
				1,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Pembulatan Gaji PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	60	1,000	
				1,400,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	350,000	1,400,000	
				302,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)				
	- Tunjangan Beras PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	75,500	302,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 11,752,414,000

Halaman: 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511628	Belanja Uang Makan PPPK (KPPN.160-Sekayu)			3,080,000	RM
	- Uang Makan PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	770,000	3,080,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,408,889,000	
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran			469,306,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu)			436,922,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
	- KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	1.0 THN	75,665,804	75,665,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			32,384,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	1,079,467	32,384,000	
B	Langganan Daya dan Jasa			188,800,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu)				RM
	- Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG]	1.0 THN	2,800,039	2,800,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,000,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	83,334	1,000,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	416,667	5,000,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	416,667	5,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu)			3,100,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	3,100,000	3,100,000	
C	Pemeliharaan Kantor			476,137,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			267,079,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	107,003	267,079,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 11,752,414,000

Halaman: 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu)			209,058,000	RM
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	21,500,000	21,500,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	29,987,000	29,987,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	28,500,000	85,500,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	<u>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</u>			100,132,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			28,216,000	RM
	- Seragam Dinas CPNS [2 CPNS x 2 STEL]	4.0 STEL	804,000	3,216,000	
	- Pakaian Dinas Honoror/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu)			71,916,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,547,000	18,564,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBPN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	880,000	10,560,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,596,000	19,152,000	
E	<u>Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc</u>			105,840,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu)			105,840,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	1,260,000	105,840,000	
H	<u>Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding</u>			46,554,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu)			46,554,000	RM
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	358	10,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	485,800	38,864,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	175,000	7,000,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	17,000	680,000	
I	<u>Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL</u>			8,010,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 11,752,414,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			8,010,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	350,000	7,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	1,000	10,000	
J	Penanganan Pandemi COVID-19			10,000	RM
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.160-Sekayu)			10,000	
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	10,000	10,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			6,639,096,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2, Paket		6,639,096,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Sarana Internal	1.0 Unit		850,482,000	RM
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			850,482,000	
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			850,482,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			850,482,000	RM
	- Genset 200 kVA	1.0 Unit	850,482,000	850,482,000	
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 m2		5,788,614,000	RM
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			5,788,614,000	
A	Lanjutan Sarling Kantor			5,788,614,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			5,788,614,000	
	- Fisik	1.0 Keg	5,010,614,000	5,010,614,000	
	- Perencana	1.0 Keg	101,000,000	101,000,000	
	- Pengawas	1.0 Keg	510,000,000	510,000,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 Keg	167,000,000	167,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 19 Februari 2024

Sekretaris


ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
 NIP 197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 187,800,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			187,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			187,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	420.0 Perkara, Berkas Perkara		163,800,000	
1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	420.0 Perkara		163,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			79,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			79,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			25,200,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	60,000	25,200,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			54,600,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	420.0 PKR	130,000	54,600,000	
052	Penetapan hari sidang			24,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			24,600,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	82,000	24,600,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			13,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			13,800,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,800,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	30,000	1,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			12,000,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	80,000	12,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			17,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			17,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			16,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	80,000	16,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			23,100,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			23,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 187,800,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			23,100,000	RM
057	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	55,000	23,100,000	U
A	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama TANPA SUB KOMPONEN			3,800,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			600,000	RM
524113	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 PKR	30,000	600,000	
058	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			3,200,000	RM
A	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama TANPA SUB KOMPONEN			1,200,000	U
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			400,000	RM
524113	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	80,000	400,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			800,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 PKR	80,000	400,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 PKR	80,000	400,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	33.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	33.0 Orang		24,000,000	U
051	Pos Bantuan Hukum TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
A				24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 JL	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 19 Februari 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom
 NIP 197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 167,800,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			167,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			167,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	420.0 Perkara, Berkas Perkara		143,800,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	420.0 Perkara		143,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			66,405,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			66,405,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			8,805,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	20,965	8,805,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			57,600,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	420.0 PKR	137,143	57,600,000	
052	Penetapan hari sidang			50,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			50,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			50,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksanaan)	300.0 OK	167	50,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			23,740,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			23,740,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			2,400,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			21,340,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	142,267	21,340,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			14,080,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,080,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,800,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	36,000	1,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			12,280,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	61,400	12,280,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			31,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			31,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 167,800,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			31,800,000	RM
057	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	75,715	31,800,000	U
A	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama TANPA SUB KOMPONEN			4,800,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			600,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 PKR	30,000	600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			4,200,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 PKR	130,000	2,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama TANPA SUB KOMPONEN			2,925,000	U
A				2,925,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			900,000	RM
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	180,000	900,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			2,025,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 PKR	220,000	1,100,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penaschat Hukum	5.0 PKR	185,000	925,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	33.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	33.0 Orang		24,000,000	U
051	Pos Bantuan Hukum TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
A				24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 JL	100,000	24,000,000	

Pangkalan Balai, 19 Februari 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom

NIP 197612032011011005

- Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; Subkomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Hal 1 dari 6

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %	
JUMLAH SELURUHNYA	11,752,414,000	0	10,916,483,014	376,857,181	11,293,340,195	459,073,805
WA Program Dukungan Manajemen	11,752,414,000	0	10,916,483,014	376,857,181	11,293,340,195	459,073,805
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan						
WA.1066 Administrasi	5,113,318,000	0	4,387,968,689	373,357,181	4,761,325,870	351,992,130
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,113,318,000	0	4,387,968,689	373,357,181	4,761,325,870	351,992,130
EBA.962 Layanan Umum	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	6,000
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	6,000
051.0C Inventaris Perkantoran CPNS	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	6,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	6,000
000070. Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	6,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	5,108,872,000	0	4,383,528,689	373,357,181	4,756,885,870	351,986,130
001 Gaji dan Tunjangan	3,699,983,000	0	3,112,833,143	239,605,504	3,352,438,647	347,544,353
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3,699,983,000	0	3,112,833,143	239,605,504	3,352,438,647	347,544,353
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,545,686,000	0	1,440,232,380	105,245,300	1,545,477,680	208,320
000001. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1,13,178,000	0	113,173,160	0	113,173,160	4,840
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,13,004,000	0	112,999,700	0	112,999,700	4,300
000003. Belanja Gaji Pokok PNS	1,319,504,000	0	1,214,059,520	105,245,300	1,319,304,820	199,180
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	47,000	0	23,795	1,330	25,125	21,875
000004. Belanja pembulatan Gaji PNS	38,000	0	19,613	1,330	20,943	17,057
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	7,000	0	2,210	0	2,210	4,790
000006. Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	1,972	0	1,972	28
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	110,939,000	0	100,413,140	7,417,600	107,830,740	3,108,260
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	95,425,000	0	84,907,930	7,417,600	92,325,530	3,099,470
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	7,680,000	0	7,675,360	0	7,675,360	4,640
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	7,834,000	0	7,829,850	0	7,829,850	4,150
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	31,531,000	0	28,387,662	2,075,012	30,462,674	1,068,326

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Hal 2 dari 6

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023		s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
				Periode Ini				
000010. Belanja Tunj. anak PNS	27,063,000	0	23,928,294	2,075,012	26,003,306	96.08 %	1,059,694	
000011. Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	2,198,000	0	2,193,930	0	2,193,930	99.81 %	4,070	
000012. Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	2,270,000	0	2,265,438	0	2,265,438	99.80 %	4,562	
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	28,020,000	0	25,150,000	2,010,000	27,160,000	96.93 %	860,000	
000013. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00 %	0	
000014. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00 %	0	
000015. Belanja Tunj. Struktural PNS	24,000,000	0	21,130,000	2,010,000	23,140,000	96.42 %	860,000	
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,176,090,000	0	1,085,745,000	83,370,000	1,169,115,000	99.41 %	6,975,000	
000016. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	83,370,000	0	83,370,000	0	83,370,000	100.00 %	0	
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	83,370,000	0	83,370,000	0	83,370,000	100.00 %	0	
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,009,350,000	0	919,005,000	83,370,000	1,002,375,000	99.31 %	6,975,000	
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	156,114,000	0	100,271,110	6,301,290	106,572,400	68.27 %	49,541,600	
000019. Belanja Tunj. PPh PNS	124,638,000	0	68,804,794	6,301,290	75,106,084	60.26 %	49,531,916	
000020. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	15,751,000	0	15,746,286	0	15,746,286	99.97 %	4,714	
000021. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	15,725,000	0	15,720,030	0	15,720,030	99.97 %	4,970	
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	93,812,000	0	84,658,980	6,083,280	90,742,260	96.73 %	3,069,740	
000022. Belanja Tunj. Beras PNS	93,812,000	0	84,658,980	6,083,280	90,742,260	96.73 %	3,069,740	
511129 Belanja Uang Makan PNS	421,977,000	0	214,727,000	21,982,000	236,709,000	56.10 %	185,268,000	
000023. Belanja Uang Makan PNS	421,977,000	0	214,727,000	21,982,000	236,709,000	56.10 %	185,268,000	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	120,395,000	0	22,825,000	1,280,000	24,105,000	20.02 %	96,290,000	
000024. Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	2,005,000	0	2,005,000	0	2,005,000	100.00 %	0	
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,825,000	0	1,825,000	0	1,825,000	100.00 %	0	
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS	116,565,000	0	18,995,000	1,280,000	20,275,000	17.39 %	96,290,000	
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	10,589,000	0	7,941,600	2,647,200	10,588,800	100.00 %	200	
000076. Gaji Pokok PPPK	10,589,000	0	7,941,600	2,647,200	10,588,800	100.00 %	200	
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	216	72	288	28.80 %	712	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIP A atau FOK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIP A/POK selesai menjadi DIP A.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program: Kegiatan: Output: SubOutput: Komponen: SubKomponen: Akun: Item:

Periode Desember 2023

Hal 3 dari 6

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN		
			Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode	%
000078. Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	216	72	288	28.80 %	712
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0	1,050,000	350,000	1,400,000	100.00	0
000077. Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK	1,400,000	0	1,050,000	350,000	1,400,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	302,000	0	217,260	72,420	289,680	95.92 %	12,320
000079. Tunjangan Beras PPPK	302,000	0	217,260	72,420	289,680	95.92 %	12,320
511628 Belanja Uang Makan PPPK	3,080,000	0	1,190,000	770,000	1,960,000	63.64 %	1,120,000
000080. Uang Makan PPPK	3,080,000	0	1,190,000	770,000	1,960,000	63.64 %	1,120,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,408,889,000	0	1,270,695,546	133,751,677	1,404,447,223	99.68 %	4,441,777
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	469,306,000	0	403,271,270	66,019,300	469,290,570	100.00	15,430
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	436,922,000	0	376,592,070	60,317,300	436,909,370	100.00	12,630
000027. Honorarium Sopir	44,196,000	0	36,830,000	7,366,000	44,196,000	100.00	0
000028. Honorarium Satpam	88,392,000	0	73,660,000	14,732,000	88,392,000	100.00	0
000029. Honorarium Pramubakti	200,880,000	0	167,400,000	33,480,000	200,880,000	100.00	0
000030. THR Sopir	3,683,000	0	3,683,000	0	3,683,000	100.00	0
000031. THR Satpam	7,366,000	0	7,366,000	0	7,366,000	100.00	0
000032. THR Pramubakti	16,740,000	0	16,740,000	0	16,740,000	100.00	0
000033. KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	75,665,000	0	70,913,070	4,739,300	75,652,370	99.98 %	12,630
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,384,000	0	26,679,200	5,702,000	32,381,200	99.99 %	2,800
000034. Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	32,384,000	0	26,679,200	5,702,000	32,381,200	99.99 %	2,800
002.0B Langganan Daya dan Jasa	202,900,000	0	199,470,889	916,572	200,387,461	98.76 %	2,512,539
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	188,800,000	0	188,750,039	0	188,750,039	99.97 %	49,961
000035. Lisensi Vidio Conference	2,800,000	0	2,750,039	0	2,750,039	98.22 %	49,961
000036. Langganan Internet	186,000,000	0	186,000,000	0	186,000,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	0	995,620	0	995,620	99.56 %	4,380
000037. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,000,000	0	995,620	0	995,620	99.56 %	4,380
522112 Belanja Langganan Telepon	5,000,000	0	2,634,230	615,072	3,249,302	64.99 %	1,750,698

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program: Kegiatan; Output: SubOutput; Komponen: SubKomponen; Akun: Item;

Periode Desember 2023

Hal 4 dari 6

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023		s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
				Periode Ini				
000038. Langganan telpon	5,000,000	0	2,634,230	615,072	3,249,302	64.99 %	1,750,698	
522113 Belanja Langganan Air	5,000,000	0	4,016,000	301,500	4,317,500	86.35 %	682,500	
000039. Langganan Air	5,000,000	0	4,016,000	301,500	4,317,500	86.35 %	682,500	
522141 Belanja Sewa	3,100,000	0	3,075,000	0	3,075,000	99.19 %	25,000	
000040. Langganan Web Hosting	3,100,000	0	3,075,000	0	3,075,000	99.19 %	25,000	
002.0C Pemeliharaan Kantor	476,137,000	0	445,345,063	30,498,900	475,843,963	99.94 %	293,037	
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	267,079,000	0	252,846,440	14,230,000	267,076,440	100.00 %	2,560	
000041. Pemeliharaan gedung dan Bangunan	267,079,000	0	252,846,440	14,230,000	267,076,440	100.00 %	2,560	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209,058,000	0	192,498,623	16,268,900	208,767,523	99.86 %	290,477	
000042. Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kail)	5,760,000	0	5,661,000	0	5,661,000	98.28 %	99,000	
000043. Perawatan Laptop	3,650,000	0	1,105,000	2,540,000	3,645,000	99.86 %	5,000	
000044. Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kail)	45,021,000	0	43,428,750	1,590,000	45,018,750	100.00 %	2,250	
000045. BBM Sewa Roda 4	21,500,000	0	19,119,700	2,374,900	21,494,600	99.97 %	5,400	
000046. Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat)	29,987,000	0	27,293,000	2,694,000	29,987,000	100.00 %	0	
000047. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua)	6,000,000	0	5,821,567	111,000	5,932,567	98.88 %	67,433	
000048. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	85,500,000	0	83,054,606	2,384,000	85,438,606	99.93 %	61,394	
000049. Perawatan Komputer	4,380,000	0	2,525,000	1,850,000	4,375,000	99.89 %	5,000	
000050. Perawatan Printer	2,760,000	0	1,265,000	1,450,000	2,715,000	98.37 %	45,000	
000051. Perawatan AC	4,500,000	0	3,225,000	1,275,000	4,500,000	100.00 %	0	
002.0D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	100,132,000	0	88,146,000	11,986,000	100,132,000	100.00 %	0	
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,216,000	0	28,216,000	0	28,216,000	100.00 %	0	
000052. Seragam Dinas CPNS	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000	100.00 %	0	
000053. Pakaiain Dinas Honorer/pegawai tidak tetap	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00 %	0	
000054. Pakaiain Dinas Pegawai	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	100.00 %	0	
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71,916,000	0	59,930,000	11,986,000	71,916,000	100.00 %	0	
000055. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18,564,000	0	15,470,000	3,094,000	18,564,000	100.00 %	0	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIP/PA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIP/PA/POK selesai menjadi DIP/PA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Hal 5 dari 6

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023		s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
				Periode Ini				
000056. Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNB	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0	
000057. Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	0	9,000,000	1,800,000	10,800,000	100.00	0	
000058. Honorarium Bendahara	9,240,000	0	7,700,000	1,540,000	9,240,000	100.00	0	
000059. Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatangan SPM	10,560,000	0	8,800,000	1,760,000	10,560,000	100.00	0	
000060. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG	19,152,000	0	15,960,000	3,192,000	19,152,000	100.00	0	
002.0E Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	105,840,000	0	88,200,000	17,640,000	105,840,000	100.00	0	
522141 Belanja Sewa	105,840,000	0	88,200,000	17,640,000	105,840,000	100.00	0	
000061. Bantuan Sewa Rumah Dinas	105,840,000	0	88,200,000	17,640,000	105,840,000	100.00	0	
002.0H Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding	46,554,000	0	39,302,324	5,690,905	44,993,229	96.65 %	1,560,771	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,554,000	0	39,302,324	5,690,905	44,993,229	96.65 %	1,560,771	
000062. Swab	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000	
000063. Uang Harian	38,864,000	0	34,030,000	4,750,000	38,780,000	99.78 %	84,000	
000064. Transportasi	7,000,000	0	4,613,703	940,905	5,554,508	79.35 %	1,445,392	
000065. Penginapan	680,000	0	658,621	0	658,621	96.86 %	21,379	
002.0I Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL	8,010,000	0	6,960,000	1,000,000	7,960,000	99.38 %	50,000	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,010,000	0	6,960,000	1,000,000	7,960,000	99.38 %	50,000	
000066. Transportasi	1,000,000	0	960,000	0	960,000	96.00 %	40,000	
000067. Uang Harian	7,000,000	0	6,000,000	1,000,000	7,000,000	100.00	0	
000068. Penginapan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000	
002.0J Penanganan Pandemi COVID-19	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000	
522191 Belanja Jasa Lainnya	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000	
000069. Penyemprotan Disinfektan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000	
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	6,639,096,000	0	6,528,514,325	3,500,000	6,532,014,325	98.39 %	107,081,675	
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,639,096,000	0	6,528,514,325	3,500,000	6,532,014,325	98.39 %	107,081,675	
EBB.951 Layanan Sarana Internal	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; Subkomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Hal 6 dari 6

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000
053.0A Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000
000075. Genset 200 KVA	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
051.0A Lanjutan Sarifing Kantor	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,010,614,000	0	5,006,421,000	0	5,006,421,000	99.92 %	4,193,000
000071. Fisik	101,000,000	0	98,568,000	0	98,568,000	97.59 %	2,432,000
000072. Perencanaan	510,000,000	0	432,176,000	0	432,176,000	84.74 %	77,824,000
000073. Pengawas	167,000,000	0	144,349,325	3,500,000	147,849,325	88.53 %	19,150,675
000074. Pengelola Kegiatan							

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program: Kegiatan: Output: SubOutput: Komponen: SubKomponen: Akun: Item:

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023		s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
				Periode Ini				
JUMLAH SELURUHNYA	167,800,000	0	148,633,405	18,643,500	167,276,905	99.69 %	523,095	
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	167,800,000	0	148,633,405	18,643,500	167,276,905	99.69 %	523,095	
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	167,800,000	0	148,633,405	18,643,500	167,276,905	99.69 %	523,095	
BCA Perkara Hukum Perseorangan	143,800,000	0	128,633,405	14,643,500	143,276,905	99.64 %	523,095	
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	143,800,000	0	128,633,405	14,643,500	143,276,905	99.64 %	523,095	
051 Pendaftaran Berkas Perkara	66,405,000	0	62,595,925	3,800,000	66,395,925	99.99 %	9,075	
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	66,405,000	0	62,595,925	3,800,000	66,395,925	99.99 %	9,075	
521211 Belanja Bahan	8,805,000	0	8,797,700	0	8,797,700	99.92 %	7,300	
000001. Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	8,805,000	0	8,797,700	0	8,797,700	99.92 %	7,300	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,600,000	0	53,798,225	3,800,000	57,598,225	100.00	1,775	
000002. Alat Tulis Kantor	57,600,000	0	53,798,225	3,800,000	57,598,225	100.00	1,775	
052 Penetapan hari sidang	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000	
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000	
000003. Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksanaan)	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000	
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	23,740,000	0	20,834,920	2,652,000	23,486,920	98.93 %	253,080	
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	23,740,000	0	20,834,920	2,652,000	23,486,920	98.93 %	253,080	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	1,714,920	492,000	2,206,920	91.95 %	193,080	
000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2,400,000	0	1,714,920	492,000	2,206,920	91.96 %	193,080	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,340,000	0	19,120,000	2,160,000	21,280,000	99.72 %	60,000	
000005. Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	21,340,000	0	19,120,000	2,160,000	21,280,000	99.72 %	60,000	
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Pulusan Kepada JPU dan Terdakwa	14,080,000	0	12,151,620	1,779,000	13,930,620	98.94 %	149,380	
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	14,080,000	0	12,151,620	1,779,000	13,930,620	98.94 %	149,380	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,800,000	0	1,591,620	99,000	1,690,620	93.92 %	109,380	
000006. Pengiriman Petikan/Salinan Pulusan	1,800,000	0	1,591,620	99,000	1,690,620	93.92 %	109,380	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023		s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
				Periode Ini				
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,280,000	0	10,560,000	1,680,000	12,240,000	99.67%	40,000	
000007. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	12,280,000	0	10,560,000	1,680,000	12,240,000	99.67%	40,000	
056 Minutasi/Upaya hukum	31,800,000	0	27,450,000	4,312,500	31,762,500	99.88%	37,500	
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	31,800,000	0	27,450,000	4,312,500	31,762,500	99.88%	37,500	
521211 Belanja Bahan	31,800,000	0	27,450,000	4,312,500	31,762,500	99.88%	37,500	
000008. Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	31,800,000	0	27,450,000	4,312,500	31,762,500	99.88%	37,500	
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	4,800,000	0	3,238,440	1,560,000	4,798,440	99.97%	1,560	
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,800,000	0	3,238,440	1,560,000	4,798,440	99.97%	1,560	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600,000	0	598,440	0	598,440	99.74%	1,560	
000009. Pengiriman Salinan Putusan	600,000	0	598,440	0	598,440	99.74%	1,560	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	2,640,000	1,560,000	4,200,000	100.00%	0	
000010. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	2,600,000	0	1,600,000	1,000,000	2,600,000	100.00%	0	
000011. Pemberitahuan Putusan Banding	1,600,000	0	1,040,000	560,000	1,600,000	100.00%	0	
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2,925,000	0	2,362,500	540,000	2,902,500	99.23%	22,500	
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,925,000	0	2,362,500	540,000	2,902,500	99.23%	22,500	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	0	842,500	35,000	877,500	97.50%	22,500	
000012. Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	900,000	0	842,500	35,000	877,500	97.50%	22,500	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,025,000	0	1,520,000	505,000	2,025,000	100.00%	0	
000013. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	1,100,000	0	880,000	220,000	1,100,000	100.00%	0	
000014. Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Perseorangan	925,000	0	640,000	285,000	925,000	100.00%	0	
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00%	0	
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00%	0	
051 Pos Bantuan Hukum	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00%	0	
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00%	0	
522131 Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00%	0	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIP A atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIP A/POK selesai menjadi DIP A.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Hal 3 dari 3

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uratan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023		SISA
				Periode Ini	s.d. Periode	ANGGARAN
					%	
000015. Honor Advokat Piket	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100,00
						0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir